

Pengembangan Kemampuan Ekonomi Desa Lewat BUMDes guna Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk

Angkasawati¹, Afifatul Laela²

¹Universitas Tulungagung / Tulungagung, Indonesia

²Universitas Tulungagung / Tulungagung, Indonesia

angkasawatiangkasawati@gmail.com

afifatullaela@gmail.com

ABSTRAK

Riset ini bermaksud buat mengenali, mendefinisikan serta mengintepretasikan pengembangan kemampuan ekonomi dusun lewat BUMDes pada peningkatkan kesejahteraan penduduk di Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dan mengenali apa saja yang jadi factor pendukung ataupun penghambatnya. Metode pengumpulan informasi yang dipakai pemantauan, tanya jawab, serta dokumentasi. Metode analisa informasi yang dipakai ialah prosedur analisa kualitatif. BUMDes merupakan selaku salah satu program harapan dalam upaya menaikkan independensi perekonomian desa. BUMDes lahir selaku pendekatan terkini dalam upaya meningkatkan perekonomian desa yang bersumber pada keperluan warga dan kemampuan desa. Pengurusan BUMDes seluruhnya dilaksanakan oleh warga desa. Kehadiran BUMDes Larasti bisa mensupport timbulnya lagi kerakyatan sosial desa lewat kenaikan kualitas warga desa terkait pengurusan BUMDes dengan cara berkesinambungan, dan kontribusi warga desa pada BUMDes jua tidak lagi menurun. Hasil riset membuktikan kalau BUMDes Larasati Desa Kendalbulur dalam pengembangan kemampuan ekonomi desa lewat lembaga upaya kepunyaan dusun guna menaikkan kesejahteraan warga mempunyai sekian banyak kategori ikhtiar yang dilakukan antara lain: bidang usaha sosial, finansial, bidang usaha penyewaan, badan perantara, perdagangan, ikhtiar bersama, kontraktor, digitalisasi serta jejaring. Kategori upaya yang dijalani ini telah baik dan pastinya dapat memajukan usahanya. Terdapat sebagian aspek yang pengaruhi pengembangan kemampuan ekonomi desa lewat BUMDes guna menaikkan kesejahteraan warga, ialah aspek pendukung antara lain: Komitmen Pemerintah serta Tersedianya Sumber Daya individu, sebaliknya yang jadi aspek penghambatnya yaitu: Aspek Anggaran serta Terbatasnya Dorongan dari Pihak Swasta.

Kata Kunci : pengembangan, kemampuan ekonomi, kesejahteraan warga

ABSTRACT

This research intends to identify, define and interpret the development of hamlet economic capacity through BUMDes in increasing the welfare of residents in Kendalbulur Village, Boyolangu District, Tulungagung Regency and identify what are the supporting or inhibiting factors. Information collection methods used monitoring, question and answer, and documentation. The information analysis method used is a qualitative analysis procedure. BUMDes is one of the hopeful programs in an effort to increase independence of village economy. BUMDes was born as the latest approach in an effort to improve the village economy based on the needs of residents and village capabilities. BUM-Des management is entirely carried out by villagers. The presence of BUMDes Larasti can support the emergence of village social democracy through increasing the capacity of villagers regarding the management of BUM-Des in a

sustainable manner, and the contribution of villagers to BUM-Des will also not decrease. The results of the research prove that BUM-Des Larasati Kendalbulur Village in developing village economic capacity through hamlet-owned business institutions to increase the welfare of the residents has various types of activities carried out including: social business, finance, leasing business, intermediary agencies, trade, joint ventures, contractors, digitization and networking. This category of efforts has been good and can certainly advance the business. There are several aspects that affect the development of village economic capacity through BUM-Des to increase the welfare of the community, namely supporting aspects including: Government commitment and Availability of individual resources, whereas inhibiting factor are: Budgetary Aspects and Limited Encouragement from the Private Party.

Keywords: development, economic capacity, citizen welfare

PENDAHULUAN

ketentuan UU No 6 Tahun 2014 terkait Desa sebagai prioritas berarti bagi warga dimana Desa diprioritaskan selaku “tenaga besar” yang hendak membagikan peran serta pada tujuan Indonesia yang berdaulat, sejahtera serta terhormat. Pemerintah berkomitmen menjaga penerapan peraturan Desa dengan cara terstruktur, tidak berubah- ubah dan berkesinambungan, guna menggapai desa yang memiliki kemajuan, kokoh, serta kerakyatan. Sebagai realisasi anggaran desa ialah sebagai tindak lanjut program pemerintah mendirikan Indonesia dari pinggiran dengan menguatkan daerah- daerah serta desa dalam kerangka Negara kesatuan yang bermaksud guna menambah kesejahteraan serta pemerataan pembangunan lewat kenaikan pelayanan public, memajukan perekonomian, menangani kesenjangan pembangunan antar desa dan menguatkan warga selaku poin dari pembangunan. Pengembangan agrowisata desa merupakan usaha pengurusan pesona darmawisata dengan optimalisasi pemandangan alam yang natural, alami, origin dalam kehidupan konvensional di desa (Ridwan & Aini, 2019) Diantara desa yang mempunyai pesona kepariwisataan bisa mengundang hasrat beberapa turis yang ada di Kabupaten Tulungagung ialah Agrowisata Mulyosari di Kecamatan Pagerwojo – Kab. Tulungagung.

Pemerintah mengaplikasikan pendekatan terkini yang diharapkan bisa mengerakkan roda per ekonomian di per desa an ialah lewat pendirian kelembagaan ekonomi yang diatur seluruhnya oleh warga desa yakni Badan Usaha Milik Desa(BUM-Des) selaku salah satu program harapan dalam upaya tingkatkan independensi. Pengembangan Kemampuan Ekonomi Desa Lewat BUM-Des Buat Tingkatkan Kesejahteraan Warga. BUM-Des lahir selaku pendekatan terkini dalam upaya tingkatkan perekonomian desa yang bersumber pada keinginan warga dan kemampuan desa. Pengurusan BUM-Des seluruhnya dilaksanakan oleh warga desa. Metode kegiatan BUM-Des merupakan dengan metode menampung semua kegiatan- kegiatan ekonomi warga dalam satu wujud lembaga upaya yang diatur dengan cara handal, tetapi senantiasa beralasan pada kemampuan asli desa itu sendiri. Perihal ini bisa menghasilkan upaya warga bisa lebih produktif serta efisien. Alhasil diharapkan guna kedepannya BUM-Des hendak berperan selaku tiang independensi bangsa yang sekalian jadi badan yang menampung aktivitas ekonomi warga yang bertumbuh dengan bersumber pada karakteristik khas desa dalam bagan tingkatkan keselamatan warga desa.

BUMDes ini bermula dari meminjamkan biaya pada warga desanya yang mau memiliki usaha. Dari dini berdirinya BUMDes ini memperoleh modal dari pemerintah daerah yakni Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Bersamaan berjalannya durasi, modal yang dipunyai terus menjadi berkurang, apalagi kesertaan warga buat meminjam uang usaha ke BUMDes ini pula terus menjadi menurun. Semacam yang sudah dikenal memanglah desa amat sedikit anggarannya. Kehadiran BUMDes Kendalbulur diharapkan bisa mensupport timbulnya lagi kerakyatan sosial didesa dari kenaikan kapasitas warga desa terkait dari pengurusan BUMDes dengan cara berkepanjangan, serta kesertaan warga desa pada BUM-Des pula tidak lagi menurun. Tidak hanya itu, pemerintah desa pula dapat berasumsi produktif serta inovatif dalam membagikan aktifitas ekonomi desa lewat kepemilikan BUM-Des alhasil bisa membuat

perekonomian wilayah yang dirasa di perlukan biar terciptanya bidang profesi terkini, menciptakan benda serta pelayanan, menaikkan perdagangan antar- pemerintah wilayah serta membagikan layanan yang maksimal untuk pengguna. Berikutnya, BUM-Des bisa berdiri dengan tujuan selaku pelopor pembangunan wilayah serta jadi penggerak terciptanya zona korporasi di pedesaan namun dengan anggaran pembuatan serta pengelolanya yang tidak begitu besar.

RUMUSAN MASALAH

Merujuk pada hal diatas dalam riset ini formulasi permasalahannya ialah yang kesatu bagaimana pengembangan kemampuan ekonomi desa lewat BUM-Des guna menaikkan kesejahteraan warga di Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Yang kedua apa sajakah yang jadi aspek penghalang serta pendukung pengembangan kemampuan ekonomi desa lewat BUM-Des buat menaikkan kesejahteraan warga di Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

TUJUAN PENELITIAN

Riset ini bermaksud buat mengenali, mendefinisikan serta mengintepretasikan pengembangan kemampuan ekonomi Desa lewat BUM-Des di Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu-Kabupaten Tulungagung.

METODE PENELITIAN

Prosedur riset ditujukan menjadi metode keilmuan untuk memperoleh informasi atau data bertujuan serta mempunyai manfaat spesifik. Sesudah itu ada yang berkata selaku riset yang bagus bila penelitian itu menciptakan sesuatu ikhtisar lewat jenjang atau tahap yang sistematis dalam memakai pembuktian dengan cara menyakinkan (Sugiono, 2016). Meski riset ini mengenakan pendekatan kualitatif, dalam riset ini senantiasa diperlukan fokus riset supaya obyek riset ataupun obyek riset tidak menyebar. Selanjutnya fokus riset dalam riset ini yaitu:

1. Pengembangan kemampuan ekonomi desa lewat BUMDes guna menaikkan kesejahteraan warga di Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung
2. Faktor- faktor penghalang serta pendukung pengembangan kemampuan ekonomi lewat BUMDes guna menaikkan kesejahteraan warga di Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

Metode terbaik yang bisa dijalani oleh periset guna memastikan kesesuaian posisi riset yakni ialah periset mengarah obyek riset untuk melaksanakan sesuatu pemantauan pada pertanda atau peristiwa dengan cara biasa (Moleong, 2021). Adapun lokasi penelitian adalah BUMDes yang terletak di Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu-Kabupaten Tulungagung.

Data merupakan bagian teramat berarti dalam riset, oleh karena itu keabsahan, keseluruhan serta bukti informasi amat pengaruhi hasil akhir dari riset ini.

1. Jenis Data

a. Data Primer

Langsung diperoleh dari pangkal data posisi riset ataupun subjek riset dengan metode menghimpun data- data yang bermanfaat serta kasus yang diangkat. Dalam perihal ini informasi/data didapat dengan cara langsung dari pangkal awal dilapangan yang mencakup informasi yang diserahkan oleh pelapor atau informan.

b. Data Sekunder

Keterangan yang diolah, diterbitkan oleh orang lain ataupun badan lain. Basis informasi sekunder bersumber dari buku, program kegiatan, rencana atau aktivitas, informasi, literatur- literatur yang terpaut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam riset ini, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Narasumber/Informan antara lain :

- 1) Kepala Desa
- 2) Pengurus BUMDes Kendalbulur
- 3) Warga Desa Kendalbulur

b. Sumber Data Sekunder

Sumber informasi ini ialah:

- 1) Buku-buku mengenai manajemen dan pengembangan BUMDes
- 2) Aktivitas/agenda
- 3) Artikel
- 4) Laporan/Hasil penelitian

KERANGKA TEORI

Pengembangan Potensi Ekonomi

1. Pengertian Pengembangan

Menurut UU No 18 Tahun 2002, Pengembangan merupakan aktifitas ilmu pengetahuan & teknologi yang bermaksud menggunakan kaidah serta filosofi ilmu wawasan yang sudah teruji kebenarannya buat tingkatkan peranan, khasiat, serta aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, ataupun menciptakan teknologi terkini. Pengembangan dengan cara biasa berarti pola perkembangan, transformasi dengan cara lambat- laun (*evolution*) serta transformasi dengan cara berangsur- angsur. Pengembangan merupakan sesuatu upaya buat tingkatkan keterampilan teknis, teoritis, abstrak, serta akhlak cocok dengan keperluan lewat pembelajaran serta bimbingan. Pengembangan merupakan sesuatu cara merancang penataran dengan cara rasional, serta analitis dalam rangka buat menentukan keseluruhan yang hendak dilaksanakan dalam cara aktivitas belajar dengan mencermati kemampuan serta kompetensi partisipan ajar (Abdul Hamid, 2005:24). Istighfarotul Rahmaniayah (2010:2) dalam bukunya pendidikan etika menyatakan: pengembangan terfokus pada perspektif fisik semacam ketangkasan, kesehatan, cakap, inovatif, serta semacamnya. Pengembangan itu dilakukan dalam institusi serta pula luar institusi semacam di dalam keluarga ataupun warga. Bersumber pada penafsiran pengembangan yang sudah dijabarkan yang diartikan dengan pengembangan yaitu sesuatu upaya guna menaikkan kemampuan teoritis, abstrak, serta budi pekerti untuk menghasilkan kemampuan yang terdapat jadi suatu yang lebih bagus dan berguna.

2. Pengertian Potensi Ekonomi

Potensi yakni seluruh suatu perihal yang bisa dijadikan selaku materi ataupun basis yang hendak diatur baik lewat upaya yang dilakukan insan ataupun yang dilakukan lewat mesin dimana dalam pengerjaannya kemampuan bisa pula dimaksud selaku pangkal energi yang terdapat disekitar kita (Kartasapoetra, 1987 : 56). Perihal ini dapat berbentuk seluruh pangkal energi alam yang ada di muka dunia ini, baik yang bisa diperbarui ataupun yang tidaklah bisa diperbaharui. Kemampuan ekonomi merupakan keahlian ekonomi yang terdapat di wilayah yang bisa jadi dan patut dibesarkan alhasil bakal selalu bertumbuh jadi pangkal rezeki orang setempat apalagi bisa menekan perekonomian wilayah dengan cara totalitas guna meningkat dengan sendirinya dan berkelanjutan (M, Suparmoko, 2002:99).

Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan bisa didefinisikan sebagai situasi hasil akumulasi dari kebahagiaan individu- individu. Penafsiran dasar itu membawakan pada uraian lingkungan yang dibagi dalam 2 arena persoalan. kesatu ialah apa lingkup dari pokok kesejahteraan kedua yaitu bagaimana keseriusan pokok itu dapat direpresentasikan hasil akumulasi. Kesejahteraan ialah beberapa kebahagiaan yang didapat seorang dari hasil penggunaan penghasilan yang diperoleh. Tetapi begitu level dari kesejahteraan itu sendiri ialah suatu yang bertabiat relatif sebab terkait dari besarnya kebahagiaan yang didapat dari hasil menggunakan penghasilan itu. Sunarti (2012),

Kesejahteraan ialah sesuatu aturan kehidupan serta penghidupan sosial, material, ataupun kejiwaan yang meliputi rasa keselamatan, kesucilaan serta ketentraman lahir batin yang membolehkan tiap masyarakat negeri guna melangsungkan usaha-usaha pemuasan kepentingan fisik, rohani serta sosial yang sebaik-baiknya untuk diri, rumah tangga & publik. Kesejahteraan ialah beberapa kegembiraan yang yang didapat seorang dari hasil mengonsumsi penghasilan yang diperoleh, tetapi kadar dari kesejahteraan itu sendiri ialah suatu yang bertabat relative sebab terpaut dari besarnya kesenangan yang didapat dari hasil konsumsi pemasukan itu. keterlibatan antara skema kesejahteraan serta rancangan kebutuhan merupakan dengan terpenuhinya kebutuhan- kebutuhan itu, hingga seorang telah ditaksir damai makmur, sebab jenjang keperluan itu dengan cara tidak langsung searah dengan penanda kesejahteraan (Pramata, dkk 2012). Material ataupun kebatinan yang diiringi dengan rasa keamanan, kesucilaan serta ketentraman diri, rumah tangga dan publik lahir serta batin yang membolehkan tiap masyarakat bisa melaksanakan upaya pelampiasan keperluan jasmanai, rohani serta sosial yang sebaik- baiknya untuk diri sendiri, rumah tangga, dan warga dengan menjunjung besar hak- hak dasar (Lionny, dkk, 2013). Kesejahteraan ialah titik ukur untuk publik yang berarti kalau sudah terletak pada situasi yang damai makmur. Penafsiran sejahtera itu sendiri merupakan keadaan orang dimana orang- orangnya dalam kondisi mampu, dalam kondisi bugar, serta rukun, alhasil buat menggapai situasi itu orang itu membutuhkan upaya pantas keahlian yang dipunyanya. Pakar ekonomi menaksirnya menjadi indikasi dari penghasilan pribadi (*flow of income*) dan kemampuan beli (*purechasing of power*) publik. Hal inilah menjadikan kesejahteraan berarti sempit sebab cuma meninjau *income* menjadi indikator kemakmuran ekonomi bermakna peninjauan kesejahteraan menjadi anonim dari keadaan miskin” (Dwi 2008 diacu oleh Widyastuti 2012).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan

Faktor-faktor membuat kesejahteraan antara lain : a. kondisi hunian yang mereka huni; b. terdapat atau tidaknya listrik dan fasilitas air bersih; c. kondisi infrastruktur secara umum; d. Jenjang penghasilan yang didapat. Tidak hanya itu terselip juga aspek non ekonomi yang faktor- faktor yang pengaruhi kesejahteraan warga diamati bersumber pada sosial ataupun alam. Faktor- faktor non ekonomi yang pengaruhi kesejahteraan warga antara lain:

- a. Efek kebiasaan warga dalam kehidupan masyarakat
- b. Iklim alam
- c. kebebasan berperilaku dan mengeluarkan gagasan.

Faktor lain yang berdampak pada tingkat kesejahteraan, yaitu:

- a. struktur usia masyarakat. Panduan prediksi lain dalam hal kesejahteraan warga, yang bukan cuma ditinjau bersumber pada pandangan pemasukan amat bermacam- macam. Panduan prediksi yang lain tersebut ialah nilai impian hidup.
- b. Penyaluran pemasukan warga. Evaluasi kesejahteraan masyarakat tidak cuma dengan memandang besar kecilnya pemasukan perkapita namun wajib mencermati penyaluran pemasukan digolongan masyarakat. Negeri maju sudah membuktikan bahwa pembangunan ekonomi pada kesimpulannya akan diiringi oleh penyaluran pemasukan yang lebih menyeluruh. Kemajuan di negara yang sedang berkembang membuktikan kalau dalam cara itu penyaluran pemasukan keadaannya jadi lebih tidak menyeluruh.
- c. Pola pengeluaran warga. Peruntukan pengeluaran warga ialah salah satu Panduan prediksi buat memperhitungkan kesejahteraan warganya.
- d. Susunan pemasukan nasional. Ketika ada 2 warga dengan pemasukan per jiwa yang serupa, tingkatan kesejahteraannya amat berlainan bila susunan produksi nasional-nya amat berbeda. Seorang warga hendak menilai tingkatan kesejahteraan yang lebih kecil dari yang dicerminkan oleh pemasukan perkapitanya bila nisbah pemasukan nasional yang berbentuk pengeluaran buat pertahanan serta pembuatan modal lebih besar dari pada di bangsa lain yang serupa penghasilan perkapitanya.
- e. Perbandingan masa longgar Ketidak sempurnaan pemasukan perkapita selaku perlengkapan

pembeda kesejahteraan warga yang berasal dari perbandingan masa longgar yang dinikmati bermacam-macam warga. Pemasukan per jiwa bertambah akan bernanonim dengan masa longgar yang dirasakan. Kesejahteraan terjalin bila masa longgar serta pemasukan berbanding seajar.

f. Kondisi pengangguran. Tujuan berarti lain dari pembangunan ekonomi merupakan guna menghasilkan peluang pekerjaan, sehingga pembangunan ekonomi yang dilaksanakan tidak hanya harus mampu kurangi tingkatan pengangguran saja.

Indikator Kesejahteraan

Indikator adalah suatu keterangan untuk memebrikan penelitian. Untuk mendapatkan nilai kesejahteraan perlu untuk memperhatikan kesejahteraan, diantaranya yaitu: a. pendapatan yang merata, hal ini berhubungan dengan keseajhteraan ekonomi. b. Pendidikan yang layak. penafsiran mudah disini dalam makna jarak dan nilai yang wajib dibayarkan oleh publik. Pendidikan yang mudah serta pula ekonomis ialah angan- angan seluruh orang. Dengan pendidikan yang mudah serta ekonomis itu, seluruhnya yang besar itu, mutu sumberdaya manusianya terus menjadi bertambah. Dengan begitu peluang buat mendapatkan profesi yang layak terus menjadi terbuka. akibatnya ketenteraman individu dapat dilihat dari daya mereka buat mengakses pendidikan, dan bisa memanfaatkan pendidikan itu buat mendapatkan kepentingan hidupnya. c. Tingkat kesehatan yang semakibn baik. d. Informasi yang informative dan dapat dipertanggungjawabkan. Terjadi pemerataan pendapatan di masyarakat sehingga tidak ada kecemburuan sosial.

Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk atas prakarsa(inisiasi warga), dan melandaskan pada prinsip- prinsip yang kooperatif, partisipatif serta emansipatif, dengan 2 prinsip-prinsip yang melandasi, yakni *member base* serta *self help* (Ramadana, 2013). Profesionalisme pengurusan BUMDes betul- betul didasarkan pada keinginan(kemufakatan) warga banyak(*member base*), dan keahlian tiap badan buat mandiri dalam penuhi keperluan dasarnya (*self help*), bagus guna kebutuhan penciptaan (selaku produsen) ataupun mengkonsumsi (selaku pemakai) wajib dilakukan dengan cara professional serta mandiri, (Ramadana, 2013). BUMDes didirikan guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi masyarakat lembaga komersial, pertama- tama menyebelahi terhadap pelampiasan hendak kepentingan(produktif maupun konsumtif) dari warga merupakan melewati jasa distribusi penyediaan benda serta pelayanan. Perihal ini direalisasikan pada logistik keinginan warga yang tidak membebankan (semacam: harga lebih ekonomis serta gampang memperolehnya) serta profitabel. Pada perihal ini, BUMDes selaku institusi Komersial, konsisten mencermati kemampuan dan efektifitas pada aktivitas zona riil serta instansi finansial(legal selaku LKM), (Ramadana, 2013). Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa didefinisikan sebagai “Badan usaha milik desa selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa”. BUM-Des dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUM-Des adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUM-Des memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya local yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga social melalui kontribusi penyediaan pelayanan social yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUM-Des telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat (Alkadafi, 2014). 2. Bahwa begitu pentingnya BUM-Des untuk Desa ketentuan BUM-Des dalam UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 6 Tahun 2014 dapat diketahui ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 lebih elaboratif. UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur hanya dalam satu pasal yaitu Pasal 213, bahwa: 1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pondasi badan BUMDes ini ialah institusi sosial ekonomi di desa yang betul- betul sanggup menjadi badan yang sanggup berkompetisi ke luar desa. BUMDes selaku institusi ekonomi rakyat, pertama-tama untuk

memenuhi keinginan (produktif ataupun konsumtif) warga lewat jasa penyaluran penyediaan benda serta pelayanan. Perihal ini direalisasikan dalam logistik keinginan warga yang tidak memberati warga (semacam: harga lebih ekonomis serta gampang memperolehnya) serta profitabel. BUMDes selaku institusi Komersial, senantiasa mencermati kemampuan dan efektifitas dalam aktivitas zona riil serta badan finansial (legal selaku LKM) (Ramadana, 2013). Bersumber pada Pasal 1 Ayat (6) UU Desa, BUMDes merupakan lembaga usaha yang semua ataupun beberapa besar modalnya dipunyai oleh Desa lewat keikutsertaan dengan cara langsung yang berawal dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengatur aset, pelayanan jasa serta upaya yang lain buat sebesar-besarnya kesejahteraan Warga Desa. Sebaliknya Dalam UU No 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Desa pada Pasal 213 Ayat (1) diterangkan bahwa desa bisa mendirikan BUMDes berdasar keinginan serta kemampuan desa. BUMDes dibangun berdasarkan atas peraturan perundang-undang yang legal atas perjanjian antar warga desa. Tujuannya peningkatan serta penguatan perekonomian desa. BUMDes mempunyai guna selaku badan menguntungkan lewat ijab sumberdaya local yang bermaksud buat mencari profit serta badan social lewat partisipasi penyediaan pelayanan social yang membela pada kebutuhan warga. BUMDes sudah membagikan partisipasi positif untuk penguatan ekonomi di pedesaan dalam meningkatkan perekonomian warga(Alkadafi, 2014).

2. Berartinya BUMDes Untuk Dusun 20 Determinasi BUMDes dalam UU No 32 Tahun 2004 dengan UU No 6 Tahun 2014 bisa dikenal determinasi dalam UU No 6 Tahun 2014 lebih elaboratif. UU No 32 Tahun 2004 menata cuma dalam satu artikel ialah Artikel 213, kalau: 1) Dusun bisa mendirikan tubuh upaya kepunyaan dusun cocok dengan keinginan serta kemampuan dusun.

2) Tubuh upaya kepunyaan dusun berdasar dalam peraturan perundangundangan.

3) lembaga usaha milik desa bisa melaksanakan pinjaman cocok peraturan perundang- undangan. Beranjak dari determinasi itu, sejatinya logika pendirian BUMDes didasarkan dalam keinginan serta kemampuan dusun, selaku usaha kenaikan keselamatan warga. Bertepatan dengan pemograman serta pendiriannya, BUMDes dibentuk atas prakarsa(penobatan) warga, dan melandaskan dalam prinsip- prinsip kooperatif, partisipatif, kejernihan, emansipatif, akuntabel, serta sustainable dengan metode berplatform badan serta perusahaan mandiri. Dari seluruh itu yang terutama merupakan kalau pengelolaan BUMDes wajib dicoba dengan cara professional serta mandiri. BUMDes ialah tiang aktivitas ekonomi di dusun yang berperan selaku instansi social(sosial institution) serta menguntungkan(commercial institution). BUMDes selaku instansi sosial membela pada kebutuhan warga melewati kontribusinya pada penyediaan jasa sosial(Ridlwan, 2014). Misi pendirian BUMDes antara lain pada bagan kenaikan Pendapatan Asli Desa(PADes). Sebaliknya selaku instansi menguntungkan bermaksud berburu profit melewati ijab sumberdaya local(benda serta pelayanan) ke pasar. Pada melaksanakan usahanya prinsip kemampuan serta efektifitas wajib senantiasa dipusatkan. BUMDes selaku instansi hukum, dibangun bersumber pada aturan perundang- undangan yang legal, determinasi itu berkarakter biasa, sebaliknya pembangunannya dicocokkan dengan perjanjian yang tersadar di warga dusun. Dengan begitu, wujud BUMDes bisa beraneka ragam di tiap dusun di Indonesia. Macam wujud ini cocok dengan karakter lokal, kemampuan, serta sumberdaya yang dipunyai masingmasing desa(Ridlwan, 2014). Misi kesimpulannya, BUMDes selaku instrument modal sosial yang diharapkan jadi jembatan yang mengaitkan dusun dengan lingkup perekonomian diluarnya alhasil jadi penguat ekonomi di desa. Buat menggapai situasi itu dibutuhkan tahap penting serta taktis untuk menggabungkan kemampuan, keinginan pasar, serta kategorisasi konsep instansi itu ke pada sesuatu perencanaan. Disamping itu, butuh mencermati kemampuan lokalistik dan dukungan kebijaksanaan(good will) dari rezim di atasnya buat mengeliminir rendahnya surplus aktivitas ekonomi desa diakibatkan mungkin tidak bertumbuhnya sector ekonomi di area desa. Alhasil integrasi system serta bentuk pertanian pada maksud besar, upaya perdagangan, serta pelayanan yang terstruktur hendak bisa dijadikan selaku prinsip pada aturan mengurus instansi.(Abdul Dermawan 2019: 16). Pendirian tubuh upaya wajib diiringi dengan usaha penguatan kapasitas serta dibantu oleh kebijaksanaan wilayah(kabupaten atau kota) yang menyediakan serta mencegah upaya ini dari bahaya kompetisi

para investor besar. memandang institusi upaya ini ialah instansi ekonomi terkini yang bekerja di desa serta sedang menginginkan alas yang kokoh buat berkembang serta bertumbuh. Pembina alas untuk pendirian BUMDes merupakan Pemerintah. BUMDes dalam operasionalisasinya idealnya juga ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi asset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Oleh karena itu, meski setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat dan didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikhawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang. Tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Abdul Karim, 2019:17). Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat social dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan). (Ridlwani, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui BUMDes Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pengembangan Potensi Ekonomi Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

BUMDes Larasati Desa Kendalbulur memiliki Jenis-Jenis Usaha yang dijalankan antara lain :

a. Bisnis sosial

Permendesa PDPTT Nomor 4 tahun 2015 Pasal 19 menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Tentu saja istilah bisnis sosial harus kita pahami sebagai paradigma umum yang menjadi model usaha BUMDes. BUM Desa Larasati adalah sebagai Badan Usaha Milik Desa yang senantiasa berorientasi pada masyarakat sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan sebagai berikut : 1. Meningkatkan perekonomian desa 2. Memanfaatkan aset desa untuk kesejahteraan masyarakat 3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa 4. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga 5. Membuka lapangan kerja dengan mendirikan unit usaha yang bisa melibatkan pekerja banyak orang seperti tempat wisata 6. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (PADes).

b. Keuangan

Bum-Des menitik beratkan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar masyarakat bermatapencarian sebagai petani. Dalam memperluas usaha pertaniannya, masyarakat membutuhkan bantuan dana. Dari pertimbangan tersebut, BUMDesa LARASATI membentuk unit usaha Simpan Pinjam bagi masyarakat. Usaha ini bisa dijalankan karena adanya penyertaan modal dari Pemerintah Desa. Penyertaan modal tahun 2016 sebesar Rp 14.000.000,00 dan pada tahun 2017 sebesar Rp 30.000.000,00, sehingga total penyertaan modal BUMDesa sebesar Rp. 44.000.000,00. Berdasarkan penyertaan modal yang sudah digelontorkan oleh Pemerintah Desa

Kendalbulur mulai tahun 2016 tersebut berjalan dengan baik, dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

- Pemanfaat program : 23 Orang
- Aktif : 18 Orang
- Macet : 5 Orang
- Omzet 2019 : Rp. 10.001.000,00
- Omzet 2020 : Rp. 17.759.000,00

c. Bisnis penyewaan

Saat ini masih terdapat di Unit Usaha Wisata desa “Nangkula Park” adalah sebagai berikut :

→ Sub Unit Usaha Permainan Anak Sub unit usaha ini disediakan arena permainan anak dengan menyewakan sarana permainan antara lain rumah balon, odong-odong, becak mainan, karusel dan aneka permainan lainnya. Dari sub unit usaha ini menghasilkan omset pada Tahun 2020 sebesar Rp 62.183.000,00 Sedangkan penyerapan tenaga kerja untuk unit ini per Maret 2021 sejumlah 2 orang.

→ Sub Unit Parkir Sub unit ini mengelola dan menyewakan lahan parkir Rp. 3.000,00 untuk sepeda motor serta Rp. 5.000,00 untuk mobil di area unit wisata desa Nangkula Park. Saat ini penyerapan tenaga kerja untuk unit per Juli 2021 sejumlah 6 orang.

→ Sub Unit Penyewaan Room 77 Sub unit ini mengelola penyewaan ruang di area wisata desa Nangkula Park untuk keperluan rapat, acara keluarga, arisan dan aneka keperluan lainnya. sebagai berikut : 1. VIP Room yang menyediakan fasilitas wifi, AC, TV LCD layar lebar, dan peralatan sound system. 2. Bale Urip Iku Urup. Sub unit ini menyediakan fasilitas dengan suasana rumah Joglo Limas Jawa diantara hamparan persawahan di sekelilingnya. Unit ini menyediakan menu – menu makanan ringan ala – ala perdesaan. Selain menikmati suasana alam perdesaan pengunjung juga dapat mancing ikan di kolam yang sudah disediakan dan dapat menyewa perahu di sekitar area sawah.

d. Lembaga perantara

BUMDes menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar. Pada lini ini, BUMDesa Larasati mengikuti program Dinas PMD Tulungagung yakni marketplace www.pasardeso.tulungagung.go.id

e. Perdagangan

Dalam tahun 2018, BUMDesa menyusun agenda kerja buat membuat bagian upaya terkini. Dalam tahun itu terbentuklah bagian upaya terkini ialah bagian upaya di bidang pertanian. Bagian upaya ini berbentuk penanaman daun jeruk purut. Bagian upaya ini bisa berjalan sebab terdapatnya dukungan 78 kemampuan area desa yang sebagian besar berbentuk tanah pertanian. Tidak hanya itu, terdapatnya pelibatan modal dari Penguasa Dusun sebesar Rp 19. 000. 000, 00. Bagian upaya ini berbentuk penanaman jeruk purut yang ialah peluang menjanjikan di area Desa Kendalbulur disebabkan kebanyakan warga bertugas selaku orang tani. Upaya ini dijalani dengan metode memperdagangkan daun sitrus purut yang dijual pada tengkulak serta dijual langsung ke pasar.

f. Usaha bersama

Untuk kedepan BUM Desa Larasati akan melakukan inisiasi BUMDESMA yakni Badan Usaha Milik Desa Bersama yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh para Pemerintah Desa dan bekerjasama dengan BUMDes lainnya. Investasi Pemerintah Desa tersebut dimasukkan dalam neraca BUMDESMA sebagai Ekuitas, yang kemudian dapat dioptimalkan oleh BUMDESMA untuk mengembangkan usahanya.

g. Kontraktor

Sesuai dengan pengalaman dalam pembangunan unit usaha wisata desa Nangkula Park yang dilakukan melalui program padat karya yang mengharuskan masyarakat desa Kendalbulur berperan aktif dalam setiap detil prosesnya, tidak dipungkiri bahwa prospek bisnis kontraktor menjadi catatan tersendiri bagi BUM Desa Larasati yang bisa dilakukan di masa mendatang.

h. Digitalisasi

Perkembangan teknologi saat ini tidak dipungkiri sebagai bagian kemajuan peradaban jaman. Oleh karenanya, Kepala desa Kendalbulur membaca dengan baik peluang tersebut dengan bekerjasama dengan PT.Telkom untuk mengembangkan aplikasi Simpel Desa sebagai sarana komunikasi antar warga desa. Selain itu, untuk pemasaran unit usaha wisata Nangkula Park juga menggunakan media sosial antara lain :

1. Website : <http://www.nangkulapark.com/>
2. Facebook : <https://www.facebook.com/nangkula.park>
3. Instagram : <https://www.instagram.com/nangkulapark>
4. Twitter : <https://twitter.com/NangkulaP>
5. Youtube : <https://www.youtube.com/watch?v=OifRtkYeA8s>
6. www.pasardeso.tulungagung.go.id

i. Jejaring

BUMDesa Larasati membuka kesempatan bagi civitas akademika, perbankan dan berbagai organisasi pemerintah dan swasta antara lain : 1. Hj. Eni Widhajati dari Universitas Tulungagung 2. Dzakiyansyah Naufal dari Akademi Kesejahteraan Sosial 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Tulungagung 4. Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung 5. Klinik BUMDes Jatim 6. Scale Up BUMDes 7. Bank Jatim 8. Bank Rakyat Indonesia 9. BPJS Ketenagakerjaan

Faktor Penghambat dan Pendukung

1. Faktor Penghambat

a. Faktor Anggaran Tidak dipungkiri faktor permodalan menjadi masalah utama dalam pengembangan BUM Desa. Alokasi Dana Desa sebagai salah satu sumber dana permodalan BUM Des dalam perencanaannya tentu saja dibagi-bagi sesuai kondisi riil di lapangan sebagai pendanaan aneka program kegiatan pemerintah desa beserta pendanaan organisasi masyarakat desa lainnya. Fakta yang terjadi karena kekurangan modal tersebut adalah pengurus unit wisata desa seringkali mengalah patungan dan mengorbankan honor pendapatan demi pembangunan unit wisata desa. Demikian juga yang terjadi unit usaha BUM Desa Larasati yang lain.

b. Terbatasnya dukungan dari pihak swasta BUM Des terus berprogress sesuai dengan perkembangan jaman. Kebutuhan mencari tambahan modal dan keinginan untuk berkembang menjadi dasar berkolaborasi dengan banyak pihak. Informasi sharing program dari pihak swasta terkadang diperoleh oleh BUM Desa dalam jeda waktu singkat mendekati penutupan sehingga berpengaruh pada kualitas pengumpulan assessment. Pada Saat ini BUM Desa Larasati sedang dalam proses assessment program CSR PT. Astra Int., Tbk.

2. Faktor Pendukung

a. Komitmen pemerintah Bupati Tulungagung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Tulungagung cq. Bagian Ketahanan Pangan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung telah berkomitmen untuk membantu BUMDes Larasati melalui unit usaha wisata desa Nangkula Park, baik dari informasi permodalan, hibah dan pemasaran.

b. Tersedianya potensi SDM Desa Kendalbulur terdiri dari tiga dusun, yaitu: Dusun Kendalbulur, Dusun Genting, dan Dusun Ronggan yang terdiri dari 7 Rukun Warga dan 22 Rukun Tetangga. Tercatat 1.177 KK dengan total jumlah penduduk sejumlah 3.749 Jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sejumlah 1.883 jiwa dan perempuan sejumlah 1.866 jiwa. Tentu saja dengan jumlah masyarakat sebagaimana tersebut adalah potensi SDM yang bisa diberdayakan melalui campur tangan kejelian Pemerintah Desa Kendalbulur. Sehingga bakat dan minat masyarakat desa Kendalbulur antara lain dapat tersalurkan sebagai karyawan dan pengurus BUM Desa Larasati

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu selanjutnya dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan potensi ekonomi desa melalui BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di Desa Kendalbuur Kabupaten Tulungagung dapat dikatakan berhasil sangat baik. Dalam pengembangannya potensi ekonomi desa BUMDes Larasti memiliki jenis usaha yang dijalankan dengan baik dan sudah cukup baik dan maju, diantaranya bisnis sosial, keuangan, bisnis penyewaan, lembaga perantara, perdagangan, usaha bersama, kontraktor, digitalisasi dan jejaring. Secara umum jenis usaha yang dijalankan tersebut sudah bagus dan tentunya masyarakat lebih bisa mengembangkan usahanya, dan juga bisa berkolaborasi dalam BUMDes tersebut. Dan juga sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat semoga kedepannya bisa menambah usaha yang lain yang harus dikembangkan oleh BUMDes Larasati agar dampaknya dapat mencakup ke semua lapisan masyarakat Desa Kendalbulur.

2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan potensi ekonomi desa melalui BUMDes untuk meninggikan kesejahteraan dari masyarakat Desa Kendalbulur yakni :

a. Faktor pendukung

- Komitmen Pemerintah
- Tersedianya SDM

b. Faktor penghambat

- Faktor Anggaran
- Terbatasnya Dukungan dari Pihak Swasta

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmaniyah, Istighfarotul, 2010. Pendidikan Etika. Malang : UIN-Maliki Press
- Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424-440.
- Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 32-40.
- Sunarti E. 2012. Tekanan Ekonomi dan Kesejahteraan Objektif Keluarga di Pedesaan dan Perkotaan. *Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB*. Bogor [ID]: LPPM.
- Aan Komariyah, Djam'an Satori (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet. Bandung.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Nana Syaodih. Sukmadina. (2013) *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Meigawati, D, (2018), Implementasi Program Bumdes Di kabupaten Sukabumi (Studi Kasus Desa Cisande Kecamatan Cicantayan), Konferensi Nasional Ilmu Administrasi

- Liow,H.,LengkongF.D.J.&Novie,P.(2019).Implmentasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tondegasan Kecamatan Kawangkoan.AP:Jurnal Adminsitasi Publik. 4.(61)
- Mustanir, A. & Darmiah, D. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tella Limpoe Kabupaten Sidenteng Rappang.Jurnal Politik Profetik, 4. (2). 225. 238
- Mustanir,A.,&Jusman.(2016a).Implementasi Kebijakan Dan Efektifitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi Di Pasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Ilmiah Akmen, 13,(3), 542 558
- Mustanir,A.,&Jaya,I.(2016a). Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Politik Terhadap Perilaku Pemilih Towani Tolotang Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Politik Profetik, 4,(1), 84 97
- Mustanir,A ., & Lubis, S. (2017a). Participatory Rural Appraisal In Deliberations Of Development Planning. International Conference On Democracy.